

IX. URUSAN PEMERINTAH DAERAH

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1 1	<p>KEBIJAKAN</p> <p>Kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan dalam negeri, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, bina pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil serta keuangan daerah.</p> <p>A Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan B Penyiapan Kebijakan C Perumusan Kebijakan D Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) E MOU</p>	2 tahun	3 tahun	Permanen
2	<p>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p> <p>A Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan</p> <p>1) Ketahanan Ideologi Negara</p> <p>a. penguatan ideologi negara b implementasi ideologi negara</p> <p>2) Wawasan Kebangsaan</p> <p>a penguatan wawasan kebangsaan b implementasi ideologi negara</p> <p>3) Bela Negara</p> <p>a pendidikan bela negara b pemberdayaan bela negara</p> <p>4) Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan</p> <p>a penguatan nilai-nilai sejarah b implementasi nilai-nilai sejarah c penerbitan rekomendasi penelitian</p> <p>5) Pembauran dan Kewarganegaraan</p> <p>a pembinaan pembauran kebangsaan b pembinaan kewarganegaraan</p> <p>B Kewaspadaan Nasional</p> <p>1) Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan</p>	2 tahun	3 tahun	Permanen
	2) Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	3) Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial	2 tahun	3 tahun	Permanen
	a pedoman kewaspadaan nasional			
	4) Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing			
	a pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing	2 tahun	3 tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>5) Fasilitasi Pelayanan Umum</p> <p style="margin-left: 20px;">a fasilitasi pelayanan administrasi Kecamatan dan Kelurahan</p> <p style="margin-left: 20px;">b koordinasi pelayanan administrasi Kecamatan dan Kelurahan</p> <p style="margin-left: 20px;">c pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi Kecamatan dan Kelurahan</p> <p style="margin-left: 20px;">d monitoring dan evaluasi</p> <p>B Wilayah Administrasi dan Perbatasan</p> <p>1) Toponimi dan Data Wilayah</p> <p style="margin-left: 20px;">a fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan toponimi</p> <p style="margin-left: 20px;">b fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembakuan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan</p> <p style="margin-left: 20px;">c fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi perubahan nama rupabumi unsur alami dan unsur buatan</p> <p style="margin-left: 20px;">d fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemindahan ibukota daerah dan pemindahan pusat pemerintahan daerah</p> <p style="margin-left: 20px;">e fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kode dan data wilayah administrasi pemerintahan</p>	<p style="text-align: center;">3</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p style="text-align: center;">4</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>8 tahun</p>	<p style="text-align: center;">5</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
	<p style="margin-left: 20px;">f fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penghitungan luas wilayah</p> <p>2) Batas Antar Daerah Wilayah</p> <p style="margin-left: 20px;">a fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penetapan batas antar daerah</p> <p style="margin-left: 20px;">b fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelesaian sengketa batas antar daerah</p> <p>C Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat</p> <p>1) Tata Operasional dan Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja</p> <p style="margin-left: 20px;">a fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tata operasional polisi pamong praja</p> <p style="margin-left: 20px;">b standardisasi sarana prasarana polisi pamong praja</p> <p style="margin-left: 40px;">fasilitasi</p> <p style="margin-left: 40px;">- data pengajuan DAK</p> <p style="margin-left: 40px;">koordinasi</p> <p style="margin-left: 40px;">pembinaan dan pengawasan</p> <p style="margin-left: 40px;">monitoring dan evaluasi</p> <p>2) Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja</p>	<p>2 tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>5 tahun</p>	<p>8 tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>5 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> a fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyusunan program peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja b fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan evaluasi peningkatan kapasitas aparatur polisi pamong praja 			
	<ul style="list-style-type: none"> 3) Perlindungan Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a fasilitasi, koordinasi, pengaduan, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan masyarakat b fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan aparatur dan kelembagaan perlindungan masyarakat c Fasilitasi Pengaduan Masyarakat 	2 tahun	3 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil <ul style="list-style-type: none"> a fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan operasional penyidik pegawai negeri sipil 	2 tahun	3 tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> b fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pembinaan dan evaluasi administrasi aparatur penyidik pegawai negeri sipil 			
	<ul style="list-style-type: none"> 5) Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia <ul style="list-style-type: none"> a fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan supervisi hak asasi manusia b fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi konvensi internasional 	2 tahun	3 tahun	Musnah
	D Kawasan dan Pertanahan			
	<ul style="list-style-type: none"> 1) Kawasan Sumber Daya Alam <ul style="list-style-type: none"> a fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan sumberdaya alam yang mencakup kawasan hutan, tambang, pertanian, dan lingkungan 	2 tahun	3 tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> 2) Kawasan Sumber Daya Alam Buatan <ul style="list-style-type: none"> a fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pada kawasan perhubungan darat, dan udara 	2 tahun	3 tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> 3) Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas <ul style="list-style-type: none"> a fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pada kawasan ekonomi, industri dan perdagangan bebas 	2 tahun	3 tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> 4) Pertanahan dan Kawasan Khusus <ul style="list-style-type: none"> a penyelenggaraan urusan pertanahan 	2 tahun	3 tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>b penyelesaian sengketa pertanahan c evaluasi penataan kawasan khusus</p> <p>E Pencegahan dan Penanggulangan Bencana</p> <p>1) Identifikasi Potensi Bencana a evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana dan mitigasi bencana</p> <p>2) Organisasi Sistem dan Prosedur a evaluasi pelaksanaan pencegahan bencana dan mitigasi bencana fasilitasi - database daerah rawan bencana Koordinasi - fasilitasi serta koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana</p>	3	4	5
	<p>3) Sarana dan Prasarana a evaluasi standardisasi aplikasi peralatan penyelenggaraan penanggulangan bencana b evaluasi pengembangan informasi dan teknologi penyelenggaraan penanggulangan bencana</p> <p>4) Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran a evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran b evaluasi peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran</p>	2 tahun	3 tahun	Permanen
	<p>4) Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran a evaluasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran b evaluasi peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran</p>	2 tahun	3 tahun	Permanen
4	<p>OTONOMI DAERAH</p> <p>A Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1) Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi a pelaksanaan urusan pemerintahan daerah b penyusunan standar pelayanan minimal</p> <p>B Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah</p> <p>C Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga 1) penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah 2) administrasi kepala daerah dan DPRD 3) penyiapan perumusan kebijakan pemberdayaan kapasitas kepala daerah dan DPRD di bidang pemerintahan 4) hubungan antar lembaga daerah (pemerintah daerah dan DPRD) 5) assosiasi daerah</p> <p>D Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah</p>	2 tahun	3 tahun	Musnah
		2 tahun	3 tahun	Permanen
		2 tahun	3 tahun	Permanen
		2 tahun	3 tahun	Permanen
		2 tahun	3 tahun	Musnah
		2 tahun	3 tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2 1) kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 2) kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah 3) pengembangan kapasitas daerah	3 2 tahun 2 tahun 2 tahun	4 3 tahun 3 tahun 3 tahun	5 Permanen Musnah Musnah
5	BINA PEMBANGUNAN DAERAH			
	A Perencanaan Pembangunan Daerah / Per Wilayah	2 tahun	3 tahun	Permanen
	B Pengembangan Wilayah 1) penyusunan pedoman penyerasian pengembangan wilayah 2) penyusunan dan pemutahiran basis data dan informasi pengembangan wilayah 3) penyusunan dan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah 4) Kawasan Strategis dan Andalan a evaluasi pengembangan data b pengembangan kawasan strategis dan andalan 5) Wilayah Tertinggal a wilayah tertinggal b penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wialayah tertinggal	3 tahun	2 tahun	Permanen
	C Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup 1) Penataan Ruang Wilayah a evaluasi perencanaan, pemanfaatan tata ruang wilayah b evaluasi pelaksanaan penyerasian dan pengendalian tata ruang wilayah c implementasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	2 tahun	3 tahun	Permanen
	2) Penataan Ruang Kawasan a evaluasi tata ruang kawasan b pembinaan tata ruang kawasan c implementasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	3) Konservasi dan Rehabilitasi a evaluasi pelaksanaan konservasi b evaluasi pelaksanaan rehabilitasi c implementasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	4) Perencanaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air a evaluasi pengembangan potensi sumber daya air b evaluasi pemanfaatan sumber daya air c implementasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	5) Pengendalian Lingkungan Hidup a pengembangan instrumen kelembagaan lingkungan hidup	2 tahun	3 tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2 b analisis dan audit pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	3	4	5
	D Pengembangan Ekonomi Daerah 1) Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah a identifikasi produk unggulan dan analisis potensi ekonomi daerah b pengembangan produk unggulan dan pemanfaatan potensi ekonomi daerah 2) Promosi dan Investasi Daerah a pelaksanaan promosi ekonomi daerah b pelaksanaan investasi daerah 3) Sarana dan Prasarana Perekonomian daerah a pelaksanaan pengembangan perdagangan daerah b pelaksanaan perindustrian daerah 4) Kemitraan Usaha a perencanaan dan pengembangan kemitraan usaha ekonomi daerah b pengelolaan kemitraan usaha ekonomi daerah 5) Kelembagaan Ekonomi daerah a pelaksanaan pengembangan kelembagaan ekonomi daerah b penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah E Penataan Perkotaan 1) Perencanaan Pengendalian Perkotaan a evaluasi perencanaan perkotaan b pengendalian penataan perkotaan c fasilitasi 2) Penataan Kota Besar dan Metropolitan, Kota Menengah, dan Kota Kecil a pengendalian pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan b pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan c fasilitasi 3) Kerjasama Perkotaan a pengendalian kerjasama perkotaan antar negara b pengendalian pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan lingkungan perkotaan c fasilitasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
		2 tahun	3 tahun	Permanen
		2 tahun	3 tahun	Permanen
		2 tahun	3 tahun	Permanen
		2 tahun	3 tahun	Permanen
		2 tahun	3 tahun	Permanen
		2 tahun	3 tahun	Permanen
		2 tahun	3 tahun	Permanen
6	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA A Pemerintahan Desa dan Kelurahan 1) Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan	2 tahun	3 tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>b pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan usaha perkreditan dan simpan pinjam fasilitasi pembinaan, pendampingan dan pengawasan monitoring dan evaluasi</p> <p>3) Produksi dan Pemasaran</p> <p>a pelaksanaan pengembangan informasi pasar identifikasi produk unggulan perdesaan fasilitasi monitoring dan evaluasi</p> <p>b pelaksanaan diversifikasi pasar fasilitasi pengelolaan pasar desa fasilitasi sarana dan prasarana desa sistem penilaian kinerja pasar desa /lomba pasar desa monitoring dan evaluasi data pasar desa</p> <p>4) Usaha Ekonomi dan Keluarga</p> <p>a pelaksanaan peningkatan kewirausahaan dan perkoperasian fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga monitoring dan evaluasi</p>	2 tahun	3 tahun	Musnah
	<p>b pelaksanaan pengembangan usaha jasa dan industri kecil penyusunan Modul fasilitasi monitoring dan evaluasi</p> <p>5) Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal</p> <p>a ekonomi perdesaan identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan monitoring dan evaluasi</p> <p>b Masyarakat tertinggal</p> <p>identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal monitoring dan evaluasi</p> <p>E Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan</p> <p>1) Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan</p> <p>a pembinaan pengelolaan konservasi kawasan</p> <p>b pelaksanaan rehabilitasi lingkungan</p> <p>2) Fasilitasi Pemanfaatan lahan dan Pesisir Perdesaan</p>	2 tahun	3 tahun	Musnah
		2 tahun	3 tahun	Musnah
		2 tahun	3 tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>a pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya lahan perdesaan</p> <p>b pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya pesisir perdesaan</p> <p>3) Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan</p> <p>a pembinaan pengelolaan prasarana air dan sanitasi lingkungan</p> <p>b pembinaan pengelolaan prasarana dan sarana pemukiman</p> <p>4) Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan</p> <p>a pelaksanaan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan</p> <p>b pelaksanaan pengkajian pemanfaatan teknologi perdesaan</p> <p>5) Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan</p> <p>a pelaksanaan pemasyarakatan teknologi perdesaan</p> <p>b pelaksanaan kerjasama pengelolaan teknologi perdesaan</p>	<p style="text-align: center;">3</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p style="text-align: center;">4</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p style="text-align: center;">5</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
7	<p>KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p> <p>A Pendaftaran Penduduk</p> <p>1) Identitas Penduduk</p> <p>a fasilitasi pelaksanaan pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk</p> <p>b penyiapan pemberian nomor kendali kartu keluarga dan kartu tanda penduduk</p> <p>c fasilitasi pencetakan dan distribusi blangko dokumen kependudukan</p> <p>2) Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah NKRI</p> <p>a fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk WNI</p> <p>b fasilitasi pelaksanaan pindah datang penduduk orang asing</p> <p>c fasilitasi pelaksanaan perubahan alamat</p> <p>3) Pindah Datang Penduduk Antar Negara</p> <p>a fasilitasi pelaksanaan pendaftaran perpindahan penduduk Indonesia keluar Negeri dan WNI dari luar negeri</p> <p>b fasilitasi pelaksanaan pendaftaran orang asing tinggal terbatas</p> <p>4) Pendataan Penduduk Rentan</p> <p>a fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk korban bencana</p> <p>b fasilitasi pelaksanaan pendataan penduduk daerah terbelakang</p> <p>c fasilitasi pelaksanaan pendataan orang terlantar</p> <p>d pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan</p> <p>5) Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi</p> <p>a monitoring pelaksanaan program pendaftaran penduduk</p> <p>b evaluasi pelaksanaan program pendaftaran penduduk</p>	<p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>c pelaksanaan dokumentasi kebijakan pendaftaran penduduk</p> <p>B Pencatatan Sipil</p> <p>1) Kelahiran dan Kematian</p> <p>a fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran</p> <p>b fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kematian</p> <p>c fasilitasi pelaksanaan pencatatan kelahiran dan kematian pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pencatatan kelahiran dan kematian</p> <p>d kematian</p> <p>2) Perkawinan dan Perceraian</p>	3	4	5
		2 tahun	3 tahun	Permanen
		2 tahun	3 tahun	Permanen
	<p>a fasilitasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian agama</p> <p>b pencatatan perkawinan dan perceraian</p> <p>c pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pencatatan perkawinan dan perceraian</p> <p>3) Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta</p> <p>a pelayanan perubahan dan pembatalan akta</p> <p>b penangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta</p> <p>c pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta</p> <p>4) Pencatatan Kewarganegaraan</p> <p>a pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat kelahiran</p> <p>b pelaksanaan pelayanan pencatatan pewarganegaraan akibat non kelahiran</p> <p>c pelaksanaan pencatatan pewarganegaraan kelahirant dan non kelahiran</p> <p>d pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengangkatan pelayanan pencatatan pewarganegaraan</p> <p>5) Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi</p> <p>a penyusunan program dan kegiatan direktorat pencatatan sipil</p> <p>b monitoring pelaksanaan program pencatatan sipil</p> <p>c evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil</p> <p>d pelaksanaan dokumentasi kebijakan pencatatan sipil</p> <p>C Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>1) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>a perencanaan pengembangan sistem informasi kependudukan</p> <p>b pengembangan aplikasi</p>	2 tahun	3 tahun	Permanen
		2 tahun	3 tahun	Permanen
		2 tahun	3 tahun	Permanen
		2 tahun	3 tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2 c pengembangan pemanfaatan infrastruktur 2) Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan a pengembangan sistem kelembagaan b pengembangan sumber daya manusia	3 2 tahun	4 3 tahun	5 Permanen
	c kelembagaan informasi kependudukan 3) Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan a pengelolan data administrasi kependudukan b pemeliharaan database administrasi kependudukan c pengembangan database administrasi kependudukan d pelayanan pengelolaan data administrasi kependudukan 4) Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan a penyajian informasi administrasi kependudukan b pelaksanaan pelayanan informasi melalui media elektronik c pelaksanaan layanan informasi melalui media cetak 5) Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi a pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur luar sekolah b kebijakan kependudukan dan pengembangan wawasan kependudukan c pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan d pelaksanaan dokumentasi pelayanan informasi kependudukan D Pengembangan Kebijakan Kependudukan 1) Kuantitas Penduduk a pelaksanaan penyusunan analis jumlah, struktur dan komposisi penduduk b pelaksanaan analisis pertumbuhan penduduk c kebijakan kuantitas penduduk 2) Kualitas Penduduk a pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia anak, remaja dan pemuda b pelaksanaan kebijakan kualitas penduduk usia produktif dan lanjut usia c pelaksanaan hubungan antarlembaga dalam rangka kebijakan kualitas penduduk 3) Mobilitas Penduduk a pelaksanaan penataan persebaran penduduk antarwilayah b pelaksanaan penataan urbanisasi dan migrasi non permanen c kebijakan mobilitas penduduk	2 tahun	3 tahun	Permanen
		2 tahun	3 tahun	Musnah
		2 tahun	3 tahun	Musnah
		2 tahun	3 tahun	Permanen
		2 tahun	3 tahun	Permanen
		2 tahun	3 tahun	Permanen
	4) Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk	2 tahun	3 tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>a pelaksanaan pengembangan sistem perlindungan penduduk b pelaksanaan pengembangan sistem pemberdayaan penduduk c perlindungan dan pemberdayaan penduduk</p> <p>5) Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi a pengembangan materi wawasan kependudukan melalui jalur sekolah dan melalui jalur luar sekolah b pengembangan wawasan kependudukan c pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka pengembangan wawasan kependudukan</p> <p>E Penyerasian Kependudukan 1) Indikator Kependudukan a pelaksanaan analisis indikator kependudukan b penyusunan indikator statis kependudukan c pelaksanaan penerapan pengembangan indikator kependudukan d penyusunan dan penetapan indikator kependudukan</p> <p>2) Proyeksi Penduduk a pelaksanaan analisis proyeksi penduduk b pelaksanaan penyusunan proyeksi penduduk c pelaksanaan perumusan implikasi proyeksi penduduk d penyusunan penetapan dan perumusan implikasi proyeksi penduduk</p> <p>3) Perencanaan Kependudukan a pelaksanaan perencanaan kependudukan b pelaksanaan penyusunan analisis dampak kependudukan c pelaksanaan penyiapan perencanaan kependudukan d penyusunan dan penetapan perencanaan kependudukan</p> <p>4) Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah a penyelesaian kebijakan kependudukan dengan lembaga Internasional b penyelesaian kebijakan kependudukan dengan lembaga masyarakat dan nirlaba c penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga usaha swasta d penyerasian kebijakan kependudukan dengan lembaga non pemerintah</p> <p>5) Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah</p>	<p style="text-align: center;">3</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p> <p>2 tahun</p>	<p style="text-align: center;">4</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p> <p>3 tahun</p>	<p style="text-align: center;">5</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
8	<p>KEUANGAN DAERAH</p> <p>A Anggaran Daerah 1) Anggaran Daerah Wilayah I, II, III, dan IV a fasilitasi anggaran daerah antara lain: konsultasi, narasumber, bimbingan teknis</p>	<p>2 tahun</p>	<p>8 tahun</p>	<p>Musnah</p>

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>b evaluasi rancangan perda, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi</p> <p>c monitoring</p> <p>2) Dukungan Teknis Anggaran Daerah</p> <p>a penyiapan bahan perumusan sinkronisasi kebijakan anggaran daerah</p> <p>b penyusunan tatalaksana anggaran daerah</p> <p>c penyiapan dukungan teknis anggaran daerah</p> <p>d penyiapan data, informasi dan penyusunan laporan keuangan daerah</p> <p>B Pendapatan dan Investasi Daerah</p> <p>1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>a fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah</p> <p>b penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah</p> <p>c penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah</p> <p>d penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah</p> <p>2) Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>a fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan</p> <p>b fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan</p> <p>c penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah</p> <p>3) Badan Layanan Umum Daerah</p>	2 tahun	8 tahun	Musnah
	<p>a analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah</p> <p>b pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah</p> <p>c penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah</p> <p>4) Pengelolaan Kekayaan Daerah</p> <p>a fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan</p> <p>b fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah</p>	2 tahun	8 tahun	Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>c penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah</p> <p>5) Pinjam dan Obligasi Daerah</p> <p>a Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah/atau badan usaha milik daerah</p> <p>b fasilitasi pelaksanaan obligasi daerah</p> <p>c fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN</p> <p>d fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir serta penyertaan modal daerah</p> <p>e penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah</p> <p>C Fasilitasi Dana Perimbangan</p> <p>1) Fasilitasi Dana Alokasi Umum</p> <p>a koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum</p> <p>b sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum</p> <p>c penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum</p> <p>2) Fasilitasi Dana Alokasi Khusus</p> <p>a koordinasi penyiapan data dasar</p> <p>b sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus</p> <p>c penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus</p> <p>3) Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam</p>	10 tahun	10 tahun	Permanen
		2 tahun	8 tahun	Musnah
		2 tahun	8 tahun	Musnah
		2 tahun	8 tahun	Musnah
	<p>a koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam</p> <p>b sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam</p> <p>c penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam</p> <p>4) Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya</p> <p>a sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus</p> <p>b sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya</p> <p>c pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya</p> <p>5) Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan</p> <p>a penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan</p> <p>b penyiapan dukungan teknis dana perimbangan</p> <p>c penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan</p>	2 tahun	8 tahun	Musnah
		2 tahun	8 tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>D Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</p> <p>1) Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</p> <p style="padding-left: 20px;">a fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah</p> <p style="padding-left: 20px;">b penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah</p> <p>2) Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p style="padding-left: 20px;">a fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah</p> <p style="padding-left: 20px;">b penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah</p> <p>3) Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p style="padding-left: 20px;">a fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah</p> <p style="padding-left: 20px;">b penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah</p> <p>4) Kajian kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli</p> <p style="padding-left: 20px;">a penyiapan bahan bantuan keterangan ahli dibidang keuangan daerah</p>	3	4	5
	<p style="padding-left: 20px;">b penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah</p> <p>5) Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p style="padding-left: 20px;">a penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah</p> <p style="padding-left: 20px;">b penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah</p> <p style="padding-left: 20px;">c pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah</p>	2 tahun	3 tahun	Permanen
		2 tahun	2 tahun	Musnah
		2 tahun	2 tahun	Musnah
		2 tahun	2 tahun	Musnah
		2 tahun	2 tahun	Musnah